



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN

Jln. Kampung Baru Bukik Sikumpa Kel. Sawah Padang Aua Kuniang

PAYAKUMBUH

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN 2027

KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
Ditulis kebijakan/program/kegiatan dan tujuan dari kegiatan	Data kuantitatif, kualitatif, hasil kegiatan tahun lalu (hasil evaluasi) dan data dasar atas isu gender yang ada	Rumusan masalah yaitu adanya kesenjangan (pada akses, kontrol, manfaat dan peran laki-laki dan perempuan)	Sebab kesenjangan yang datangnya dari dalam organisasi/SKPD	Sebab kesenjangan yang datangnya dari luar organisasi/SKPD	Apabila tujuan dalam kolom 1 belum responsif gender harus dirumuskan ulang responsif gender	Rumusan baru atas program atau kegiatan untuk mencapai tujuan	Base Line Data	Indikator capaian dan target kinerja responsif gender (Input, Output dan Outcomes)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah dimulai dari Mufakat RW pada 16 RW yang ada di Kecamatan payakumbuh Selatan, Musrenbang di 6 Kelurahan, Musrenbang Tk. Kecamatan dan Musrenbang Tk. Kota. Adapun Tingkat kehadiran pada Musrenbang tingkat Kecamatan pada tahun 2026 berjumlah 150 orang dengan keterwakilan laki-laki berjumlah 82 orang dan perempuan berjumlah 68 orang.	1) Dari aspek akses : terbatasnya akses masyarakat untuk mengetahui usulan yang menjadi program prioritas Kecamatan untuk disampaikan pada musrenbang Tk Kota	1) Adanya kesenjangan SDM terutama di tingkat mufakat RT/RW dimana pengurus organisasi kemasyarakatan didominasi oleh Laki laki.	1) adanya paradigma bahwa pria lebih paham terhadap kebutuhan pembangunan yang ada terutama kegiatan pembangunan yang bersifat fisik	Tersusunnya skala prioritas Musrenbang tingkat kecamatan yang responsif Gender	1) Melaksanakan Kegiatan Musrenbang dari tingkat RW sampai ke tingkat Kecamatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	input : 1) panduan musrenbang 2) Peserta musrenbang 3) fasilitator 4) narasumber	Rumusan Kinerja Skala Prioritas yang menjadi Usulan Kecamatan payakumbuh Selatan ditingkat Kota payakumbuh Sesuai dengan Kebutuhan dan responsif Gender
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tujuan: Tersusunnya skala prioritas Musrenbang tingkat kecamatan	Usulan kebutuhan kegiatan pembangunan dari masyarakat tersebut dilakukan proses penyingkiran sesuai dengan aturan yang berlaku, akibatnya pada setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah ada usulan prioritas, baik dari prioritas tingkat RW, Kelurahan maupun kecamatan. dalam pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan tersebut mayoritas usulan berasal dari laki laki terutama kegiatan yang bersifat fisik	2) Dari aspek partisipasi : masih kurangnya persentase keterlibatan perempuan dalam mengusulkan Program kegiatan Pembangunan terutama pada pelaksanaan mufakat RW. 3) Dari aspek Kontrol: keterbatasan kontrol masyarakat terhadap usulan yang menjadi Skala prioritas di tingkat kecamatan / kota sudah sesuai dengan kebutuhan 4) Manfaat: sasaran program dan kegiatan yang diusulkan tidak spesifik memperhatikan kebutuhan - kebutuhan khusus baik laki - laki maupun perempuan	2). Masih belum memperhatikan tentang arti konsep gender dalam merumuskan program/kegiatan 3) Keterbatasan Peserta musrenbang Tk. Kecamatan	2) Belum semua Perempuan yang mau mengungkapkan pendapat atau aspirasinya ketika kegiatan musrenbang dilaksanakan		2) Menetapkan Peserta Musrenbang dengan memperhatikan keterwakilan laki - laki dan perempuan 3) menyediakan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait program prioritas kecamatan 4) Dalam penyusunan skala prioritas kecamatan memperhatikan Konsep Gender	output : Terlaksananya kegiatan Musrenbang kecamatan	Indikator Kinerja : 1) Proporsionalnya persentase keterlibatan laki-laki dan perempuan Sebagai Peserta Musrenbang; 2) Dokumen Skala Prioritas usulan musrenbang yang responsif Gender 1 Dokumen



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN

Jln. Kampung Baru Bukik Sikumpa Kel. Sawah Padang Aua Kuniang

PAYAKUMBUH

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN 2027

KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
Ditulis kebijakan/program/kegiatan dan tujuan dari kegiatan	Data kuantitatif, kualitatif, hasil kegiatan tahun lalu (hasil evaluasi) dan data dasar atas isu gender yang ada	Rumusan masalah yaitu adanya kesenjangan (pada akses, kontrol, manfaat dan peran laki-laki dan perempuan)	Sebab kesenjangan yang datangnya dari dalam lembaga/SKPD	Sebab kesenjangan yang datangnya dari luar lembaga/SKPD	Apabila tujuan dalam kolom 1 belum responsif gender harus dirumuskan ulang responsif gender	Rumusan baru atas program atau kegiatan untuk mencapai tujuan	Menjelaskan rumusan kinerja untuk In put, Output dan Outcomes dari kegiatan yang diselenggarakan	Indikator capaian dan target kinerja responsif gender (Input, Output dan Outcomes)
PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1) Dalam pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Payakumbuh selatan tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi masyarakat	1) Aspek Akses : belum seluruh anggota lembaga kemasyarakatan dapat mengakses informasi terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh DPC LPM dan PKK	1). Masih belum memperhatikan tentang arti konsep gender dalam merumuskan program/kegiatan	1) Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll; sehingga dalam Pengusulan nama kepengurusan DPC LPM masih didominasi Laki- Laki	Tujuan : Meningkatnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan yang responsif Gender	1) Dalam Penetapan SK Kepengurusan DPC LPM dan PKK memperhatikan Persentase Keikutsertaan Laki Laki dan perempuan yang seimbang	input : lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Selatan	Rumusan Kinerja : Meningkatnya Peran dan fungsi Lembaga kemasyarakatan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di kecamatan
Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	2) kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk pembinaan, koordinasi dengan pihak terkait dan lomba - lomba tingkat kecamatan sampai dengan tingkat propinsi	2) Aspek Partisipasi : Untuk Kegiatan PKK partisipasi Perempuan lebih menonjol dibanding laki - Laki begitupun sebaliknya untuk kegiatan DPC LPM laki laki memiliki peran yang lebih dominan	2) dalam Penyusunan Rencana Kerja tahunan lembaga DPC LPM dan PKK belum memperhatikan konsep gender	2) Adanya Pemikiran bahwa Pengurusan PKK merupakan bagian tanggung Jawab dari Perempuan dan kegiatannya bersentuhan langsung dengan perempuan sehingga pengusulan nama pengurus di dominasi perempuan		2) Pelaksanaan Pembinaan dan Rapat Koordinasi Secara berkala	output: Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Koordinasi dan Lomba - lomba	Indikator Kinerja 1) Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan, rapat Koordinasi Secara Berkala 1 kali sebulan 2) Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
Tujuan : Meningkatnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan	3) Kegiatan pembinaan ditujukan pada Lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan terdiri dari DPC LPM dengan keanggotaan 15 orang yang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 6 orang perempuan dan PKK dengan keanggotaan 25 orang yang terdiri dari 25 orang perempuan, adapun Kepengurusan DPC LPM didominasi oleh laki-laki, Kepengurusan PKK didominasi oleh Perempuan	3) Aspek Kontrol : keterbatasan Kapasitas Anggota lembaga kemasyarakatan dalam mengontrol pelaksanaan Kegiatan DPC LPM dan PKK	3). Masih Kurangnya Sosialisasi Konsep Gender dalam penyusunan kepengurusan DPC LPM dan PKK	3) Keterbatasan Waktu anggota organisasi dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan		2) Optimalisasi Peran Laki - laki dan perempuan dalam pelaksanaan Kegiatan baik itu di Lingkup PKK ataupun DPC LPM		
		4) Aspek manfaat : belum seluruh anggota lembaga kemasyarakatan yang memahami pentingnya peran mereka dalam mendukung pelaksanaan kegiatan lembaga						